



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Kotak Pos 1016 Pontianak 78116 A  
Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : [admin@dislautkan.kalbarprov.go.id](mailto:admin@dislautkan.kalbarprov.go.id)

**R  
E  
N  
J  
A**

**P  
D**

**2  
0  
2  
3**

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini dimaksudkan agar dijadikan panduan dan alat kontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, yang merupakan penjabaran terhadap pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini.


Prioritas Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu pengembangan perikanan budidaya air payau dan laut, pengembangan perikanan tangkap, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan, pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi cakupan kegiatan Bidang KP3KP, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan serta kegiatan penunjang kesekretariatan baik Dinas maupun UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang secara bertahap akan diwujudkan dalam setiap tahun ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Aparatur Kelautan dan Perikanan Provinsi dan berbagai pihak, atas dukungannya dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dimasa yang akan datang.

Pontianak, 24 Agustus 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat

  
Ir. HERTI HERAWATI, MMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680725 199303 2 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	79
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	79
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	81
3.3. Program dan Kegiatan.....	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
.....	85
BAB V PENUTUP .....	136



## B A B. I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada



Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra K/L, dan Renja Kab/Kota.



2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
  34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038;



37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut.
41. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0176/PPEP-BAPPEDA Tanggal 13 Januari 2022 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah untuk menjaga konsistensi antara kebijakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, antara kebijakan makro dan mikro, antara kebijakan dan pelaksanaan, serta untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran agar akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor, antartingkat pemerintahan, antar ruang dan antar waktu serta dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal disusun sebagai berikut :

1. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup



## B A B. II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Rentra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2022.

##### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### 2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021



Pencapaian kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021

Total alokasi dan realisasi dana APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat secara umum pada tahun 2021 (**Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT PMHP, UPT PBAPL, UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**) sebagaimana pada *Tabel 2.1*.

**Tabel 2.1.** Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD TA. 2021

No DPA OPD	Program / Kegiatan	Alokasi (Rp)	Penyerapan s/d Bulan Desember		
			Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
	<b>TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>33,117,732,267</b>	<b>30,042,977,070</b>	<b>90.72</b>	<b>98.77</b>
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,467,717,500	14,689,336,064	89.20	100.00
52	TOTAL BELANJA LANGSUNG	16,650,014,767	15,353,641,006	92.21	97.56
3.01.3.01.01.01	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>9,114,039,157</b>	<b>8,712,387,208</b>	<b>95.59</b>	<b>100.00</b>
3.01.3.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,653,736,057	2,395,992,835	90.29	100.00
3.01.3.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	200,145,000	193,447,212	96.65	100.00
3.01.3.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7,600,000	6,606,659	86.93	100.00
3.01.3.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	47,868,000	47,865,000	99.99	100.00
3.01.3.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	237,511,000	230,038,000	96.85	100.00
3.01.3.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	26,283,500	26,283,500	100.00	100.00
3.01.3.01.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2,363,882,250	2,341,700,050	99.06	100.00
3.01.3.01.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	579,063,600	540,503,602	93.34	100.00
3.01.3.01.01.01.17	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	1,813,374,250	1,757,706,000	96.93	100.00





3.01.3.01.01.01.18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	783,049,750	775,200,350	99.00	100.00
3.01.3.01.01.01.19	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	401,525,750	397,044,000	98.88	100.00
3.01.3.01.01.05	UPT PELABUHAN PERIKANAN	4,245,349,560	3,466,177,572	81.65	91.02
3.01.3.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,555,128,000	1,522,384,222	97.89	99.78
3.01.3.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2,582,434,260	1,836,017,050	71.10	85.36
3.01.3.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34,830,000	34,830,000	100.00	100.00
3.01.3.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8,735,000	8,735,000	100.00	100.00
3.01.3.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,630,000	10,630,000	100.00	100.00
3.01.3.01.01.05.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	53,592,300	53,581,300	99.98	100.00
3.01.3.01.01.06	UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1,453,989,400	1,412,273,855	97.13	98.70
3.01.3.01.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	453,077,900	441,058,855	97.35	97.60
3.01.3.01.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	249,255,000	247,834,000	99.43	100.00
3.01.3.01.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28,070,000	27,000,000	96.19	100.00
3.01.3.01.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	33,494,500	31,749,500	94.79	99.42
3.01.3.01.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68,786,250	68,333,750	99.34	100.00
3.01.3.01.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH	14,818,000	14,818,000	100.00	100.00
3.01.3.01.01.06.17	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	606,487,750	581,479,750	95.88	98.70
3.01.3.01.01.07	UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT	1,836,636,650	1,762,802,371	95.98	99.64
3.01.3.01.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	560,563,350	529,265,967	94.42	99.96



3.01.3.01.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	832,304,600	812,548,704	97.63	100.00
3.01.3.01.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	50,750,000	50,512,000	99.53	100.00
3.01.3.01.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	14,305,400	13,805,400	96.50	100.00
3.01.3.01.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	69,325,950	69,301,950	99.97	100.00
3.01.3.01.01.07.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	6,371,000	6,371,000	100.00	100.00
3.01.3.01.01.07.16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA	303,016,350	280,997,350	92.73	97.87

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021, pada Belanja Tidak Langsung pencapaian target anggaran mencapai 89.20 %. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung untuk Dinas mencapai 95,31 %, UPT PMHP sebesar 97.13 % UPT-PBAPL sebesar 95,98 % dan UPT Pelabuhan Perikanan sebesar 81.65 % dari target akhir sebesar 100 %. untuk total PD Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 90.72 %

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;
- b. Kekurang cermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta Revisi anggaran di Perubahan APBD 2021 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut.



Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Tabel 2.2 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) dibawah ini :



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	$(8)=(7)/(6)*100$	9	$(10)=(5)+(7)+(9)$	$(11)=(10)/(4)*100$
3.25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu (%);	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP (%);	100.00		100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar (%);	100.00		100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00
		Persentase tingkat Disiplin Aparatur (%); nilai Kepuasan Layanan Internal (Nilai)	80.00		80.00	80.00	100	80.00	80.00	100.00



<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan Monev LPPD, LKPJ dan LAKIP ; (Dokumen)	4.00		4.00	4.00	100	4.00	4.00	100.00
		Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota ( Kali)	14.00		14.00	14.00		14.00	14.00	100.00
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	100	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	100.00
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi/ jumlah pengajuan SPM (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00





3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	100.00
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Asuransi Barang Milik Daerah (Polis)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
3.25.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang (Inventarisasi Aset) (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
<b>3.25.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase peningkatan disiplin pegawai Dinas/Persentase ASN yang menyusun dan melaporkan Kinerja tepat waktu /Persentase pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan perencanaan	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-		-	-		-	-	
3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Penetapan Kinerja (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	10.00		10.00	10.00	100	10.00	10.00	100.00
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Sosialisasi (Orang)	5.00					5.00	5.00	100.00



3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti BimTek (Orang)	5.00					5.00	5.00	100.00
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan barang /persentase sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola dengan baik/persentase tertib pengelolaan arsip (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Item)	7.00		7.00	7.00	100	7.00	7.00	100.00
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	31.00		31.00	31.00		31.00	31.00	100.00
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jenis Barang)	6.00		6.00	6.00		6.00	6.00	100.00
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan pengandaan (Item)	16.00		16.00	16.00	100	16.00	16.00	100.00
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00	100.00
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu (Tahun)	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang diolah (Berkas)	200.00		200.00	200.00	100	200.00	200.00	100.00
3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan Data dan informasi Kelautan dan Perikanan berbasis elektronik (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00



<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler (Unit)	12.00		12.00	12.00	100	12.00	12.00	100.00
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor (Unit)	21.00		21.00	21.00	100	21.00	21.00	100.00
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau bangunan lainya (Unit Mushola)	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	100.00
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran telepon,Air PDAM,listrik dan internet (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (layanan)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan Dinas (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang di pelihara (Unit)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100.00
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor (Unit)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00



3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Raiser (Tahun)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Persentase Pengelolaan Kawasan Ruang Laut dan Konservasi (%) ; Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan (%)	<b>40.00</b>		<b>30.00</b>	<b>30.34</b>	101.13	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	87.50
		Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan (%)	<b>30.00</b>		<b>20.00</b>	<b>20.89</b>	104.45	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	83.33
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Kawasan Ruang Laut dan Konservasi Yang di kelola (Kawasan)	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	166.67	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	166.67
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi RZWP3K (Dokumen)	2.00		2.00	1.00	50	2.00	1.00	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (DAK)	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola (Kawasan)	3.00		3.00	5.00	166.67	3.00	5.00	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di rehabilitasi (kawasan)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100.00
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimitigasi (Kawasan)	3.00		3.00	2.00	66.67	3.00	2.00	66.67
<b>3.25.02.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Ruang laut yang di fasilitasi layanan perijinannya (Unit)	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>	<b>3.00</b>	42.85	<b>7.00</b>	<b>3.00</b>	42.86



3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi)	7.00		7.00	3.00	42.85	7.00	3.00	42.86
3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	-								
<b>3.25.02.1.03</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</b>	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan dan dibina (Kelompok)	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	100	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	100.00
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang);	50.00		50.00	50.00	100	50.00	50.00	100.00
		Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diserahkan ke kelompok (unit); Jumlah Tambat Labuh Kapal di Pulau-Pulau Kecil yang diberikan ke masyarakat (Unit); Jumlah Bak Air Bersih Yang Diberikan ke Masyarakat (Unit)	8.00		8.00	8.00	100	8.00	8.00	100.00
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	50.00		50.00	50.00	100	50.00	50.00	100.00





3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	50.00		50.00	50.00	100	50.00	50.00	100.00
3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Bimtek Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	50.00		50.00	50.00	100	50.00	50.00	100.00
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	<b>150,380.00</b>		<b>150,380.00</b>	<b>150,625.01</b>	100.16	<b>150,380.00</b>	<b>150,625.01</b>	100.16
<b>3.25.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang menerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Kelompok)	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>	<b>32.00</b>	139.13	<b>23.00</b>	<b>32.00</b>	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Diberikan Kemasyarakat (Unit/Pekerjaan)	8.00		8.00	8.00	100	8.00	8.00	100.00
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang diserahkan kemasyarakat (Unit); Alat Penangkap Ikan (Paket); Pengadaan GPS (Unit); Solar Cell (Unit); Ben-Gas (unit); Alat Pendeteksi keberadaan Ikan (Unit)	15.00		15.00	15.00	100	15.00	15.00	100.00



3.25.03.1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap 10 sd 30 GT yang Berizin dan Tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)	174.00		174.00	185.00	106.32	174.00	185.00	106.32
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi)	174.00		174.00	185.00	106.32	174.00	185.00	106.32
3.25.03.1.05	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap < 10 GT yang terdaftar/ tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)	200.00		200.00	220.00	110	200.00	220.00	110.00
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Rekomendasi)	200.00		200.00	220.00	110	200.00	220.00	110.00
3.25.03.1.06	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan yang dikelola Provinsi (Unit)	7.00		7.00	7.00	100	7.00	7.00	100.00
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lokasi Pelabuhan perikanan Kewenangan Provinsi yang ditetapkan pembangunannya (Lokasi)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100.00
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana kepelabuhan (Unit/Pekerjaan)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100.00



3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendistribusian BBM (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
<b>3.25.03.1.07</b>	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap yang disetujui Pengadaannya (Unit)	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>	<b>63.00</b>	105	<b>60.00</b>	<b>63.00</b>	105.00
3.25.03.1.07.02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap 10 sd 30 GT (Rekomendasi)	60.00		60.00	63.00	105	60.00	63.00	105.00
<b>3.25.03.1.09</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	Jumlah Kapal Perikanan 10 sd 30 GT yang terdaftar (Unit)	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	100	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Buku Kapal Perikanan Ukuran 10 sd 30 GT (Buku)	50.00		50.00	50.00	100	50.00	50.00	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>77,244.60</b>		<b>77,244.60</b>	<b>77,561.55</b>	100.41	<b>77,244.60</b>	<b>77,561.55</b>	100.41
<b>3.25.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang sudah mempunyai izin (Unit)	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	100	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	100.00
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi CBIB dan CPIB yang diterbitkan (Rekomendasi)	7.00		7.00	25.00	357.14	7.00	25.00	357.14



3.25.04.1.02	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang direkomendasikan untuk penerbitan izin usaha perikanan (Unit)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
3.25.04.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi teknis izin usaha perikanan (Rekomendasi)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
3.25.04.1.05	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Persentase peningkatan Usaha pembudidaya ikan di laut (%)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan prasarana budidaya yang diserahkan ke POKDAKAN (Paket)	3.00		3.00	3.00	100	3.00	3.00	100.00
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (DAK)	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Laut (Paket); Jumlah Sarana Pembudidaya rumput laut (Paket)	15.00		15.00	15.00	100	15.00	15.00	100.00
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah	Jumlah bantuan sarana pembudidaya ikan (Jenis)	4.00		4.00	4.00	100	4.00	4.00	100.00



	Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang diambil dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	14.00		14.00	14.00	100	14.00	14.00	100.00
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya di Kawasan konservasi yang dibina dan dipantau (Kawasan)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku (%)	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>	<b>45.69</b>	83.07	<b>55.00</b>	<b>45.69</b>	<b>83.07</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang dipantau dari Illegal fishing (%)	<b>52.00</b>		<b>52.00</b>	<b>45.69</b>	87.86	<b>52.00</b>	<b>45.69</b>	87.87
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha ruang laut yang diperiksa (Unit)	40.00		40.00	28.00	70	40.00	28.00	70.00
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha perikanan tangkap yang diperiksa (Unit)	150.00		150.00	87.00	58	150.00	87.00	58.00
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang diperiksa (Unit)	5.00		5.00	-	0	5.00	-	0.00



3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Frekuensi gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan umum lintas Kab/Kota (Kali)	7.00		7.00	7.00	100	7.00	7.00	100.00
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pelaku Usaha perikanan Tangkap yang di periksa (Unit)	5.00		5.00	5.00	100	5.00	5.00	100.00
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diperiksa (Unit)	5.00		5.00	-	0	5.00	-	0.00
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	16,037.40		16,037.40	21,665.00	135.09	16,037.40	21,665.00	135.09
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UPI yang Berizin dan Tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)	20.00		20.00	20.00	100	20.00	20.00	100.00
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	umlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Perizinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Rekomendasi)	20.00		20.00	20.00	100	20.00	20.00	100



3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	<b>100.00</b>
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar yang di Bina (Kelompok)	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	100	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	100.00
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah Ikan (UPI) ber SKP yang dibina (UPI); Jumlah unit sentra pengolahan yang dibina (Sentra)	12.00		11.00	11.00	100	12.00	12.00	100.00
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang direhabilitasi sarana dan prasarannya (Unit)	2.00		2.00	2.00	100	2.00	2.00	100.00
<b>3.25.06.1.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang berkembang (kelompok)	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	100	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	100.00
3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bahan baku produk perikanan (Ton)	2.50		2.50	3.68	147.2	2.50	3.68	147.20





3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana Pemasaran dan Peralatan Pengolahan yang di berikan ke Kelompok pengolah dan pemasar produk KP (Unit)	93.00		93.00	93.00	100	93.00	93.00	100.00
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Profil Usaha dan Investasi Produk KP (Dokumen)	1.00		1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00
2.01.01.01.19.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS	Jumlah sarpras POKMASWAS	5		5	5	100	5	10	200.00



## 2.2. . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

No	TUJUAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN		Indikator Tujuan/ Sasaran/program	Target Capaian (Renstra/RPJMD)					Realisasi Capaian					
				2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	T	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan %	3.37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64	3.65	3.37	1.89	3.37		
	S	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	249,614	235,730	227,625	233,680	239,500	248,699	243,803	232,818	228,187		
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,614	160,000	150,380	154,891	159,135	165,255	169,557.61	151,344.11	150,625.01		
			Produksi Perikanan Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan (Ton)	4,750	4,800	4,850	4,900	5,000	4,705	4,860	7489	8587.712		
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	84,000	75,730	77,245	78,789	80,365	83,444	74,245.11	81,473.60	77,561.56		
			Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	3,500,000	4,920,000	4,537,500	4,764,375	5,002,594	2,663,000	4,567,400	5,352,000	6,200,000		
2	T	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	NTP Perikanan	104.00	101.00	102.00	103.00	104.00	104.90	109.12	102.23	105.10		



No	TUJUAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	Indikator Tujuan/ Sasaran/program	Target Capaian (Renstra/RPJMD)					Realisasi Capaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S	Meningkatnya Indeks Harga yang diterima oleh Nelayan dan/atau Pembudidaya ikan	Indeks Harga yang diterima oleh Nelayan dan/atau Pembudidaya ikan	n/a	n/a	105.00	106.00	107.00				110.95		
3	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	N/A	N/A	30	40	50				30.34		
		Persentase Desa Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Di Berdayakan	N/A	N/A	20	30	40				20.89		
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku	N/A	N/A	55.0	60.0	65.0	-	-	-	46.76		
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	N/A	15,723	16,037	16,358	16,685	-	-	-	21,665		
		Jumlah layanan uji mutu hasil perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan masyarakat	325	335	345	355	365	3,015	625	665	850		



Dari data diatas bahwa pada indicator sasaran pada tahun 2020 dan 2021 masih belum mencapai target kinerja hal ini terdapat Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah disebabkan Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah dan kurangnya penerapan teknologi penangkapan ikan.
2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama didaerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas serta kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di Kalbar hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil.
3. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas
4. Belum Optimalnya pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan dan tangkahan nelayan.
5. Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia
6. Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas dan Ketersediaan pakan ikan masih tergantung dari luar kalbar dan Produksi pakan masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu.
7. Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
8. Pencemaran air pada aliran sungai dan perairan lainnya serta wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya
9. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas.

Upaya pemecahan dalam mengantisififikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap dan penerapan teknologi alat bantu penangkapan
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana untuk mendukung Usaha Perikanan Tangkap serta optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan.
3. Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan.
4. Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan serta penguatan pendataan dan penambahan SDM data.



5. Membuat percontohan budidaya payau dan laut
6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kalbar (*penyediaan benih ikan unggul, pakan murah, pupuk dan obat-obatan ikan, pengembangan Balai Benih Ikan, dll*)
7. Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan
8. Pengendalian hama penyakit ikan dan penerapan budidaya system Bioplok, bak terpal dan perkolaman sehingga kualitas air dapat dikontrol secara rutin.
9. Penguatan akses Permodalan bagi pembudidaya ikan

Pada indikator Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola dan Persentase Desa Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Yang Di Berdayakan di tahun 2021 pada program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih belum mencapai target hal ini terdapat Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kalbar antara pelaku usaha, masyarakat dan stake holder terkait
2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
3. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut (rusaknya ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang) Kalbar
4. Upaya mitigasi bencana belum dilakukan secara terus menerus dan cenderung belum menampakan hasil
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir laut Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Upaya pemecahan dalam mengantisififikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar (RZWP3K)
2. Penetapan kawasan konservasi perairan laut daerah dan Penyelesaian penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
3. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau pulau kecil

4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar
5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Begitu juga pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku di tahun 2021 juga masih belum mencapai target hal ini terdapat Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kelembagaan Pengawas Perikanan masih belum memadai dibandingkan dengan kewenangan yang di berikan
2. Kurangnya/minimnya sarana dan SDM Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan, POLSUS KP3K.
3. Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak
4. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam bidang Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Peningkatan status Kelembagaan pengawas perikanan untuk menjalankan kewenangan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (0-12 mil laut)
2. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Melakukan patroli dan/atau operasi gabungan secara rutin, dengan melibatkan instansi lain, seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi serta instansi terkait lainnya;
4. Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan (POKMASWAS)





### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Kalimantan Barat.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa tantangan dan permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a) Ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b) Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- d) Sebagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e) Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.
- f) Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- g) Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih adanya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- h) Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil.
- i) Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- j) Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI, dll.
- k) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan.



- l) Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan instruksi air laut).
- m) Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya.
- n) penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- o) Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- p) Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- q) Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- r) Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll).

Adapun isu-isu penting (rekomendasi dan catatan yang strategis) Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

ISU STRATEGIS	REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS
Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan, dan Penggunaan alat bantu penangkapan dalam rangka peningkatan produktifitas penangkapan serta pemulihan habitat sumberdaya ikan laut kalbar dengan membangun rumah ikan buatan (rumpon).</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Provinsi Kalbar</li> <li>3. Sertifikasi keahlian nautika dan mesin kapal ikan untuk nelayan kalbar dan Peningkatan kapasitas nelayan/pelaku usaha perikanan tangkap</li> <li>4. Adanya Penyediaan akses yang mudah untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan Tangkap</li> <li>5. Revitalisasi nelayan tradisional melalui paket bantuan kapal perikanan , Alat tangkap dan mesin perikanan.</li> <li>6. Revitalisasi sarana - prasarana pangkalan pendaratan ikan / pelabuhan perikanan kewenangan provinsi dan mengoptimalkan fungsi pelayanan di pelabuhan perikanan kewenangan provinsi</li> </ol>
Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan percontohan komoditas ikan unggul payau dan laut : Laut : Kakap Putih, Kerapu, Bawal bintang dan rumput laut Payau : Udang vanamei, Udang Windu, Bandeng, Nila Salin, Rumput laut (<i>Gracilaria</i>) dan Kepiting bakau</li> <li>2. Revitalisasi sarana-prasarana balai budidaya ikan payau dan laut kalbar.</li> </ol>



Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)/ (Indo GAP).</li> <li>4. Pengendalian hama, penyakit, residu, obat-obatan dan pakan serta monitoring lingkungan berbasis kawasan</li> <li>5. Penyediaan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri.</li> <li>6. Adanya penyediaan akses yang mudah untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan Budidaya</li> </ol>
Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem rantai dingin (cool chain system) produk kelautan dan perikanan serta Pembinaan dan pengembangan standar mutu di pusat-pusat perikanan melalui pengembangan rantai dingin</li> <li>2. Pengembangan sistem logistik ikan daerah untuk menghindari kelangkaan stok produk kelautan dan perikanan di saat paceklik</li> <li>3. Promosi secara terintegrasi dan intensif dan ekspor hasil perikanan serta Pengenalan paket teknologi pengolahan hasil perikanan.</li> <li>4. Pelatihan/apresiasi nilai tambah perikanan dan bantuan sarana produksi pengolahan dan pemasaran dan alat pengolahan ikan</li> <li>5. Pemantauan kualitas produk perikanan secara berkala ke unit pengolahan di daerah</li> </ol>
Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar (RZWP3K)</li> <li>2. Penetapan kawasan konservasi perairan laut daerah dan Penyelesaian penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif</li> <li>3. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau pulau kecil</li> <li>4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar</li> <li>5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ol>
Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Gelar Operasi kegiatan IUU Fishing di perairan Kalimantan Barat secara terpadu dengan melibatkan pihak Polri, TNI AL, dan PSDKP Pusat</li> <li>7. Pendayagunaan lembaga pengawasan pusat yang ada di daerah seperti Satker Pengawasan di Sei Rengas, PPN Pemangkat, PPP Teluk Batang dan pengadilan perikanan dan melengkapi fasilitas pengawasan seperti komunikasi dan kapal pengawasan serta koordinasi dan pelatihan terhadap SDM pengawasan di kab/kota.</li> <li>8. Peningkatan sarana dan prasarana Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum yang kuat dan efektif</li> <li>9. Pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan (POKMASWAS)</li> </ol>



## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD 2018-2023 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tabel 2.5 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan: 1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis; 2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

No	Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	25				31,208,246,725	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				33,211,110,075
3	25	01			22,417,300,327	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,945,218,625
3	25	01	1.01		139,872,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				197,444,200
3	25	01	1.01	01	35,371,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	90,657,500
3	25	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	90,657,500



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9,327,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	9,327,600
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	7,004,200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7,004,200
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6,303,800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	6,566,900
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	11,236,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	11,528,500



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	70,629,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	72,359,500
3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>17,774,905,315</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>17,806,431,615</b>
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	17,475,980,315	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	17,475,980,315
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220	277,044,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220	272,094,600





No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	7,067,900	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	50,302,400
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	8,054,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	8,054,300
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6,758,200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	
3	25	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>221,779,600</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>270,503,400</b>
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	161,630,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	222,050,000



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	55,320,600	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	43,625,400
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4,829,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4,828,000
3	25	01	1.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				
3	25	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>315,002,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>202,288,848</b>
3	25	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pontianak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	9,080,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pontianak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	87	154,784,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	31,087,650



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	
3	25	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	
3	25	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	6,638,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	6,638,000
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	140,063,198
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	24,500,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	24,500,000
3	25	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	25	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pontianak				<b>914,145,060</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pontianak			<b>682,780,500</b>
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7		13,516,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13,516,600
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7		43,635,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	43,531,500
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6		76,772,900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	73,733,900
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12		43,360,700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	43,167,500



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	9,180,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	9,180,000
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pontianak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1		Penyediaan Bahan/Material	Pontianak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	57,600,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	57,600,000
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	390,569,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	314,803,000
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	23,752,200	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	23,752,200
3	25	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	255,757,860	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	103,495,800



No				Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
3	25	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>1,100,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>24,720,000</b>
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	500,000,000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	200,000,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	24,720,000
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	
3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	



No				Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
3	25	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					1,429,419,302	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1,398,008,542
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	578,388,382		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	448,388,382
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	851,030,920		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	949,620,160
3	25	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					522,176,250	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				363,041,520





No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	69,389,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	110,380,000
3	25	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pontianak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	10,000,000	Pemeliharaan Mebel	Pontianak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	10,000,000
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	92,107,750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	92,061,520
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150,600,000
3	25	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350,679,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
3	25	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
							Dipelihara/Direhabilitasi							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,790,946,398	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12,265,891,450
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				1,681,103,280	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				1,489,041,800
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				801,799,931	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				780,391,700
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pontianak	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1	82,504,995	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pontianak	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1	76,804,900



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Kubu Raya; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Kayong Utara; Kab. Bengkayang	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	637.514	260,667,642	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Kubu Raya; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Kayong Utara; Kab. Bengkayang	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	637,514	244,485,600
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Kubu Raya; Kab. Sambas; Kab. Bengkayang	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3	370,000,000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Kubu Raya; Kab. Sambas; Kab. Bengkayang	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	3	387,488,000
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Singkawang; Kab. Mempawah; Kab. Bengkayang	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60	88,627,294	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Singkawang; Kab. Mempawah; Kab. Bengkayang	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70	71,613,200
3	25	02	1.02		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				0	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				-



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	7		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	7		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0	
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	7		Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	0	
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1		Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	0	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	0	
3	25	02	1.03		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				879,303,349	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				<b>708,650,100</b>
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sambas, Bengkayang, Kayong Utara	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	707,500,749	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sambas, Bengkayang, Kayong Utara	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	399,999,900
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Bengkayang; Kab. Sambas	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	64,790,300	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Bengkayang; Kab. Sambas	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	74,790,200
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Ketapang; Kab. Kubu Raya	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50	47,976,500	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Ketapang; Kab. Kubu Raya	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	145,060,000



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Singkawang; Kab. Mempawah	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2	59,035,800	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Singkawang; Kab. Mempawah	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2	88,800,000
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>3,389,719,914</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>6,199,361,600</b>
3	25	03	1.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>				<b>2,220,583,211</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>				<b>5,291,352,700</b>
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	229,791,711	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	229,791,300



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5	1,200,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25	3,561,561,400
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5	790,791,500	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12	1,500,000,000
3	25	03	1.02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				339948126	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>139,948,000</b>



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pontianak, Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1	139,948,126.00	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pontianak, Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1	139,948,000
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1	200,000,000.00	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0	
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0	
3	25	03	1.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				114,919,300	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>109,571,300</b>





No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi		
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	175	114,919,300	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	175	109,571,300
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	202	48,934,200	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	202	63,759,200



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	25	03	1.06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>					557,659,077	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				<b>497,816,500</b>
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kab. Mempawah Kab. Kubu Raya	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2	235,046,761	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kab. Mempawah Kab. Kubu Raya	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	2	220,049,600	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1	249,201,616	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1	229,136,400	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Bengkayang, ; Kab. Ketapang, ; Kab. Sambas, ; Kota Singkawang, ; Kab. Kayong Utara, ; Kab. Kubu Raya, ; Kab. Mempawah,	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1	73,410,700	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Bengkayang, ; Kab. Ketapang, ; Kab. Sambas, ; Kota Singkawang, ; Kab. Kayong Utara, ; Kab. Kubu Raya, ; Kab. Mempawah,	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1	48,630,500	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					51,485,100	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				45,085,200	
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah; Kota Pontianak	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	30		51,485,100	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah; Kota Pontianak	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	30		45,085,200
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					56,190,900	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					51,828,700



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0	
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	50	56,190,900	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	50	51,828,700
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				974,647,429	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>2,049,345,400</b>
3	25	04	1.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				48,207,700	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>35,287,500</b>



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	28	48,207,700	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	28	35,287,500
3	25		1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	0	
3	25	04	1.05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				850,171,784	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				977,986,600



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkayang; Kab. Landak; Kab. Kapuas Hulu; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kota Singkawang; Kab. Sekadau; Kab. Melawi; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	206,426,800	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkayang; Kab. Landak; Kab. Kapuas Hulu; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kota Singkawang; Kab. Sekadau; Kab. Melawi; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	206,423,200
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya			0	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			0	



No	Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif				
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab.Bengkayang, Kab. Kayong Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4	455,068,734	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab.Bengkayang, Kab. Kayong Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4	582,888,800
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Mempawah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	14	84,286,750	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Mempawah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	14	84,286,600
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kab. Ketapang; Kab. Sambas;	Jumlah Pembudidaya	20	104,389,500	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Kayong Utara	Jumlah Pembudidaya	20	104,388,000



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Kayong Utara								
3	25	04	1.06		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>					<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>				<b>1,036,071,300</b>
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sambas	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	283,131,470	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sambas ,	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19	262,575,700
3	25	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kayong Utara; Kab. Ketapang; Kab.Sambas	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	385,030,980	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kayong Utara; Kab. Ketapang; Kab.Sambas	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	773,495,600





No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					971,223,600	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>1,175,072,100</b>
3	25	05	1.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>					783,396,400	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				<b>1,007,415,700</b>
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Ketapang; Kab. Kayong Utara, Bengkayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	50	89,203,300	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Ketapang; Kab. Kayong Utara, Bengkayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	50	89,203,300	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	170	543,644,900	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	170	748,604,300	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Mempawah, Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	8	54,830,500	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Mempawah, Kab. Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	8	54,830,500	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
							di Laut sampai dengan 12 Mil					Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	38	95,717,700	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	38	114,777,600
3	25	05	1.02		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				187,827,200	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>167,656,400</b>



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1	60,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10	50,728,700
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1	50,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	8	50,728,700
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	77,827,200	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang;	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	10	66,199,000



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	1 (Satu) Daerah Provinsi		
3	25	06				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				1,774,252,175	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				1,353,070,550
3	25	06	1.01			<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				266,968,200	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				201,078,100
3	25	06	1.01	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko		



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan										
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						
							Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi													
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	103,807,300		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	57,953,300					
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	163,160,900		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	143,124,800					



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	25	06	1.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>					455,017,675	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>410,419,300</b>
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12	189,158,800	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12	161,615,800	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kab. Sambas, Kab. Mempawah	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan	2	265,858,875	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kab. Sambas, Kab. Mempawah	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau	2	248,803,500	



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
							Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing						Digunakan, dan Berdaya Saing			
3	25	06	1.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>					1,052,266,300	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>741,573,150</b>	
3	25	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1		292,954,000	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1		273,863,900



No					Rencana Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	12	700,000,000	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	8	467,709,250
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1	59,312,300	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	0	





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stakeholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran. Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Forum Lintas OPD, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 untuk Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut ini :



Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat

<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>
1	Material Transplantasi Terumbu Karang Spesifikasi : Material Transplantasi Terumbu Karang (Konkrit beton, ukuran 60x60x10 cm, 9 tiang ikatan karang)	135	Unit	Rp. 121.500.000	Kab Bengkayang
2	Restorasi Padang Lamun Spesifikasi : Restorasi Padang Lamun	225	m <sup>2</sup>	Rp. 112.500.000	Kab Ketapang
3	Vegetasi Pantai Spesifikasi : (Mangrove/Cemara Laut , sehat segar, dalam polybag, tinggi minimal 60 cm)	5000	Batang	Rp. 75.000.000	Kab Sambas
4	Pembangunan Saprasi Air Bersih Barang Persediaan	4	Paket	Rp. 120.000.000	Kab Bengkayang, Mempawah, Sambas dan Kayong Utara
5	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Desa Sungai Daun, Kec. Selakau, Kab. Sambas
6	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Dusun Aur Kuning, Kab. Ketapang
7	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Dusun Bantilan, Desa Mekar Jaya, Kec. Sajad, Kab. Sambas
8	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	6.66	M2	Rp. 39.960.000	Dusun Durian, Desa Durian, Kab. Kubu Raya



<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>
9	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	22.5	M2	Rp. 135.000.000	Dusun Jambu, Kel. Beringin, Kec. Sajad, Kab. Sambas
10	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	22.5	M2	Rp. 135.000.000	Dusun Kadai, Desa Mekar Jaya, Kab. Sambas
11	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Dusun Kelampai, Kab. Ketapang
12	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	22.5	M2	Rp. 135.000.000	Dusun Kuayan, Desa Mekar Jaya, Kec Sajad, Kab. Sambas
13	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	15.41	M2	Rp. 92.460.000	Dusun Meraan, Kab. Kapuas Hulu
14	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	15.66	M2	Rp. 93.960.000	Dusun Parit Pangeran Rt.003/005, Kab. Kubu Raya
15	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	16.8	M2	Rp. 100.800.000	Dusun Parit Pangeran Rt.003/005, Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Tanjung Saleh
16	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Dusun Pelita, Gang Tambak RT 01/RW04, Kab. Bengkayang
17	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	15.41	M2	Rp. 92.460.000	JL Nanga Manday, Kab. Kapuas Hulu



<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>
18	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	29.33	M2	Rp. 175.980.000	Kab. Kapuas Hulu
19	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	22.5	M2	Rp. 135.000.000	Kelurahan Sepantai, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas
20	Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan Tanah Dan Bangunan Spesifikasi : Dermaga/Stegher/Gertak Nelayan, Bahan Kayu kelas 1 (belian)	30.83	M2	Rp. 184.980.000	Pulau Sitinjau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah
21	Pengadaan Kapal Motor Nelayan dan Alat Tangkap Peralatan Dan Mesin	1	Paket	Rp. 192.500.000	Kelurahan Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang
22	Pengadaan Kapal Motor Nelayan dan Alat Tangkap Peralatan Dan Mesin)	1	Paket	Rp. 192.500.000	Kelurahan Setapak Besar, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang
23	Pengadaan Sampan Kato Peralatan Dan Mesin	1	Paket	Rp. 100.000.000	Desa Punggur Besar, Kec. Sungai Kakap, Kubu Raya
24	Pengadaan Sampan Kato Peralatan Dan Mesin	1	Paket	Rp. 100.000.000	Desa Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
25	Pengadaan Sampan Kato Peralatan Dan Mesin	1	Paket	Rp. 100.000.000	Desa Sungai Bakau Laut, Kab. Mempawah
26	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Fish Finder	1	Paket	Rp. 200.000.000	Kec. Sungai Raya Kep. Kab. Bengkayang
27	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bubu Ikan	1	Paket	Rp. 150.000.000	Desa Pelapis Kec. Kep. Karimata Kab. Kayong Utara



<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>
28	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Gill Net Plastik	1	Paket	Rp. 93.000.000	Kota Singkawang
29	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan	1	Paket	Rp. 40.000.000	Kec. Jawai dan Jawai Selatan Kabupaten Sambas
30	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan	1	Paket	Rp. 93.000.000	Kota Singkawang
31	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan	1	Paket	Rp. 90.000.000	Padang Tikar Kec. Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
32	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan	1	Paket	Rp. 135.000.000	Sepok Laut Kec. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
33	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Rawai	1	Paket	Rp. 75.000.000	Kec. Salatiga Kab. Sambas
34	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Trammel Net	1	Paket	Rp. 90.000.000	Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya
35	Pengadaan Mesin Perahu Motor/ Kapal Nelayan	1	Paket	Rp. 90.000.000	Teluk Nibung Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya
36	Pengadaan Mesin Perahu Motor/ Kapal Nelayan	1	Paket	Rp. 100.000.000	Kab Mempawah
37	Pengadaan Sarana Bantu Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan	1	Paket	Rp. 200.000.000	Kab. Bengkayang
38	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut	1	Ls	Rp. 200.000.000	Kab Mempawah
39	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut	1	Ls	Rp. 200.000.000	Kab Sambas
40	Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut Spesifikasi : Bibit rumput laut lokal <i>Eucheuma Cottonii</i> , Sistem long line Serta Peralatan Pendukung	2	Unit	Rp. 100.000.000	Kab Bengkayang
41	Prasarana Budidaya dan Kelengkapannya	6	Unit	Rp. 30.000.000	Kab Mempawah



<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>
41	Prasarana Budidaya dan Kelengkapannya Mesin Pompa Air Tambak Ikan Spesifikasi : Mesin Diesel 24 PK, Sharp stainless 4 meter dan baling-baling Pipa 12 In 4 meter,	13	Unit	Rp. 30.000.000	Kab Sambas
42	Penyediaan Sarana Budidaya Udang Vaname Tambak Melinium	1	Paket	Rp. 200.000.000	Kab Mempawah
43	Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya beserta Kelengkapannya	1	Paket	Rp. 200.000.000	Kab Kapuas Hulu
44	Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya beserta Kelengkapannya	1	Paket	Rp. 100.000.000	Kab Mempawah
45	Penyediaan Sarana Kampung Perikanan Budidaya beserta Kelengkapannya	1	Paket	Rp. 100.000.000	Kab Sambas
46	Bantuan Benih Ikan Bandeng (Nener)	1	Paket	Rp. 100.000.000	Kab Kubu Raya
47	Cool Box	20	Unit	Rp. 36.000.000	Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Sekadau Kab. Bengkayang
48	Freezer	14	Unit	Rp. 116.666.200	Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Sekadau Kab. Bengkayang
49	Mesin Pencetak Bakso Peralatan Dan Mesin	3	Unit	Rp. 41.999.850	Kab. Sambas
50	Mesin Tepung Ikan Peralatan Dan Mesin	1	Unit	Rp. 200.000.000	Kab. Kayong Utara



## B A B. III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1 Kebijakan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Kinerja	Indikator Tahun 2023	Target	Keterangan	
		Provinsi			
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	15.800.000 Ha		Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	34 Provinsi	1. Indikator ini merupakan bentuk dukungan daerah dalam rangka pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.	
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	1.700.000 Ton	Indikator ditujukan untuk Provinsi yang memiliki potensi produksi garam.	
		Produksi perikanan tangkap	8.735.580 Ton	Perlu memperhatikan penguatan jaminan usaha korporasi nelayan.	

No.	Kinerja	Indikator Tahun 2023	Target	Keterangan
		Provinsi		
		Produksi perikanan budidaya	21.580.000 Ton	1. Indikator diarahkan untuk mendukung <i>Major Project</i> Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng yang berlokasi di wilayah Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
				2. Indikator diarahkan untuk mendukung salah satu program prioritas KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
				3. Agar memperhatikan pelestarian sumber daya laut dan penguatan ekonomi masyarakat melalui budidaya.
		Konsumsi Ikan	61,02 Kg/KAP/Th	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Operasi kapal/	100 hari	1. Operasi kapal/ <i>speedboat</i> pengawas dilakukan untuk pengawasan di wilayah kewenangan Provinsi (0-12 mil laut) dan Kabupaten/Kota (Perairan Umum Daratan).
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	2.870 Pelaku Usaha	
		Pokmaswas yang ditumbuhkan dan dikembangkan	1.150 Kelompok	
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	1 Forum	



### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, seharusnya didasarkan atas Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan (kapan).

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 – 2023 melalui peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dinas yang semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada publik dan penyusunan program dan kegiatan, pengendalian dan monitoring pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin efektif, efisien dan akuntabel menetapkan TUJUAN Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat diatasi, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Mengacu pada RPJMD , Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2023 Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ditekankan pada usaha meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan

Untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, sasaran pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana Tujuan dan Sasaran tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penentuan kebijakan, program dan kegiatan Pokok.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Dengan kualitas sumberdaya aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang semakin meningkat dan Peningkatan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kelautan dan perikanan dinas melalui satu pintu, yang di update secara teratur dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan serta monev agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, maka Kebijakan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih , induk unggul dan pakan yang didukung penerapan teknologi Budidaya sesuai standar serta lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.
6. Meningkatkan Tata Kelola pemerintah dan akuntabilitas kinerja ASN

### 3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program – program yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana tertera dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, program dimaksud adalah :

Tabel. 3.2 Program Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan

kode 90	PMDN Nomor 90
	Tahun 2019
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Pada Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan untuk dapat melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 5 (lima) Program Pokok, 1 (satu) Program Penunjang dan 24 Kegiatan dan 72 sub kegiatan. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Tabel Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PENANGGUNG JAWAB	Keterangan
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5		6	
1	Kelautan dan Perikanan				<b>33,211,110,075.00</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	<b>Penunjang</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	17,475,980,315.00		Gaji
					3,469,238,310.00		Operasional
	<b>Total</b>				<b>20,945,218,625.00</b>		
	<b>Pokok</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>12,265,891,450.00</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>72</b>			

## B A B. IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2023, tetap diarahkan pada pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan; peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan; peningkatan konsumsi ikan masyarakat; peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan mutu hasil perikanan.

Pada Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat beserta UPTD merencanakan untuk dapat melaksanakan 5 (lima) Program Pokok dan 1 (satu) Program penunjang Dari rencana Program dan Kegiatan tahun 2022.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan ini, maka dalam tahun 2023 program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti terlampir dalam matrik lengkap Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pagu indikatif dan sumbernya anggarannya dapat dilihat dalam matrik Renja pada **Tabel Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023** adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			33,211,110,075			33,543,221,176				
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20,945,218,625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21,154,670,811				
3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		197,444,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	199,418,642				
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	2	90,657,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	91,564,075
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	2	9,327,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	9,420,876

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	2	7,004,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	7,074,242
3 25 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	2	6,566,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	6,632,569
3 25 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	3	11,528,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	11,643,785
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	4	72,359,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4	73,083,095
3 25 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>17,806,431,615</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>17,984,495,931</b>



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	134	17,475,980,315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134	17,650,740,118
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	220	272,094,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220	274,815,546
3 25 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1	50,302,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	50,805,424
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	12	8,054,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	8,134,843
3 25 01 1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>270,503,400</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>273,208,434</b>
3 25 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	3	222,050,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	224,270,500





Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	43,625,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	44,061,654
3 25 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	4,828,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	4,876,280
3 25 01 1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>					Pendapatan Asli Daerah (PAD)			-
3 25 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>202,288,848</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>204,311,736</b>
3 25 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	1	31,087,650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	31,398,527
3 25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	1	6,638,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	6,704,380

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	12	140,063,198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	141,463,830
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	200	24,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200	24,745,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Pontianak		<b>682,780,500</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>689,608,305</b>
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	13,516,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	13,651,766
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	4	43,531,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4	43,966,815
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pontianak	4	73,733,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4	74,471,239

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	1	43,167,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	43,599,175
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	12	9,180,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	9,271,800
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	12	57,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	58,176,000
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	12	314,803,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	317,951,030
3 25 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	500	23,752,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500	23,989,722
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1	103,495,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	104,530,758



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>24,720,000</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>24,967,200</b>	
3 25 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	12	24,720,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	24,967,200	
3 25 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,398,008,542</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>1,411,988,627</b>	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	12	448,388,382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	452,872,266	
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	12	949,620,160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	959,116,362	
3 25 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>363,041,520</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>366,671,935</b>	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pontianak	7	110,380,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7	111,483,800
3 25 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pontianak	2	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	10,100,000
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	5	92,061,520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5	92,982,135
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1	150,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	152,106,000
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					Pendapatan Asli Daerah (PAD)			-
3 25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				12,265,891,450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12,388,550,365
3 25 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				<b>1,489,041,800</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>1,503,932,218</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 02 1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				<b>780,391,700</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>788,195,617</b>	
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Pontianak	1	76,804,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	77,572,949	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Kab. Kubu Raya; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Kayong Utara; Kab. Bengkayang	637,514	244,485,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	637,514	246,930,456	
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Kab. Kubu Raya; Kab. Sambas; Kab. Bengkayang	3	387,488,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	391,362,880	
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Singkawang; Kab. Mempawah; Kab. Bengkayang	70	71,613,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70	72,329,332	
3 25 02 1.02	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 02 1.03	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>				<b>708,650,100</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>715,736,601</b>	
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sambas, Bengkayang, Kayong Utara	60	399,999,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60	403,999,899	
3 25 02 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Bengkayang; Kab. Sambas	2	74,790,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	75,538,102	
3 25 02 1.03 03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Ketapang; Kab. Kubu Raya	80	145,060,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80	146,510,600	
3 25 02 1.03 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Singkawang; Kab. Mempawah	2	88,800,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	89,688,000	
						Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>								<b>6,199,361,600</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>6,261,355,216</b>
3	25	03	1.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>								<b>5,291,352,700</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>5,344,266,227</b>
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	1	229,791,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1					232,089,213
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	25	3,561,561,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25					3,597,177,014
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	12	1,500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12					1,515,000,000
3	25	03	1.02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>								<b>139,948,000</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>141,347,480</b>





Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 03 1.02 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Pontianak, Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	1	139,948,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	141,347,480
3 25 03 1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>109,571,300</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>110,667,013</b>
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang,	175	109,571,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175	110,667,013
3 25 03 1.04	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>				-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			#VALUE!

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 03 1.05	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>63,759,200</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>64,396,792</b>	
3 25 03 1.05 02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	202	63,759,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	202	64,396,792	
3 25 03 1.06	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				<b>497,816,500</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>502,794,665</b>	
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kab. Mempawah Kab. Kubu Raya	2	220,049,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	222,250,096	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Kab. Sambas	1	229,136,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	231,427,764	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Kab. Bengkayang.; Kab. Ketapang.; Kab. Sambas.; Kota Singkawang.; Kab. Kayong Utara.; Kab. Kubu Raya.; Kab. Mempawah,	1	48,630,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	49,116,805
3 25 03 1.07	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>45,085,200</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>45,536,052</b>
3 25 03 1.07 02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Kapal Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah, Kota Pontianak	30	45,085,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30	45,536,052
3 25 03 1.09 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	50	51,828,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50	52,346,987
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>2,049,345,400</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>2,069,838,854</b>
3 25 04 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>35,287,500</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>35,640,375</b>

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	28	35,287,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28	35,640,375
3	25	04	1.05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>977,986,600</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>987,766,466</b>
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkayang; Kab. Landak; Kab. Kapuas Hulu; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Sanggau; Kab. Sintang; Kota Singkawang; Kab. Sekadau; Kab. Melawi; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	1	206,423,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	208,487,432
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Bengkayang, Kab. Kayong Utara	4	582,888,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4	588,717,688
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Mempawah	14	84,286,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14	85,129,466
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kab. Kayong Utara	20	104,388,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20	105,431,880



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 04 1.06	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>				<b>1,036,071,300</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>1,046,432,013</b>	
3 25 04 1.06 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sambas ,	19	262,575,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	265,201,457	
3 25 04 1.06 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kayong Utara; Kab. Ketapang; Kab.Sambas	5	773,495,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	781,230,556	
						Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	
3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>1,175,072,100</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>1,186,822,821</b>	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 05 1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				<b>1,007,415,700</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>1,017,489,857</b>	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Ketapang; Kab. Kayong Utara, Bengkayang	50	89,203,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50	90,095,333	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Mempawah	170	748,604,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170	756,090,343	
3 25 05 1.01 03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Bengkayang; Kab. Mempawah, Kab. Sambas	8	54,830,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8	55,378,805	
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	38	114,777,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38	115,925,376	
3 25 05 1.02	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>167,656,400</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>169,332,964</b>	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	10	50,728,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	51,235,987
3 25 05 1.02 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	8	50,728,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8	51,235,987
3 25 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	10	66,199,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10	66,860,990
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>1,353,070,550</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>1,366,601,256</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 06 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>201,078,100</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>203,088,881</b>	
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	5	57,953,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	58,532,833	
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	1	143,124,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	144,556,048	
3 25 06 1.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				<b>410,419,300</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		<b>414,523,493</b>	
3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	12	161,615,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	163,231,958	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kab. Sambas, Kab. Mempawah	2	248,803,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2	251,291,535
3 25 06 1.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>				<b>741,573,150</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			<b>748,988,882</b>
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Bengkayang; Kab. Ketapang; Kab. Sambas; Kota Singkawang; Kab. Kayong Utara; Kab. Kubu Raya; Kab. Mempawah	1	273,863,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	276,602,539
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	8	467,709,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8	472,386,343

## B A B . V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan merupakan hasil koordinasi antara pelaku pembangunan baik dari unsur Pemerintah maupun Non Pemerintah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Prioritas pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan isu-isu strategis serta permasalahan mendesak yang harus segera ditangani melalui program-program pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan juga dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kewenangan berdasarkan per UU yang berlaku serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh sehingga dapat difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Rencana Kerja Tahunan juga merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja dibuat terkait dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan. Dalam implementasinya, segenap pihak yang terlibat hendaknya juga dapat "duduk bersama" dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam tahapan monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, niat dan cita-cita luhur yang tertuang dalam indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan akan memberikan peningkatan dan kemajuan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 24 Agustus 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat

**Ir. HERTI HERAWATI, MMA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680725 199303 2 003

